

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah prioritas intens pembangunan setiap negara. Ini terjadi selagi orang atau kelompok tidak mendapat akses akseptabel ke sumber daya dan peluang demi memenuhi kebutuhan dasar. Jawa Timur bisa digambarkan sebagai provinsi yang sedang naik daun dalam hal pembangunan ekonomi, meskipun masih mengantongi tantangan ekonomi yang signifikan, khususnya tingkat kemiskinan yang tinggi (Fajriah & Rahayu, 2016). Kemiskinan merupakan rumor yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memerankan provinsi teramat miskin ketiga di Jawa setelah Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta (Dzulfaroh & Hardiyanto, 2023).

Grafik 1.
Persentase 5 Provinsi Termiskin di Pulau Jawa Periode Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2024).

Persentase kemiskinan memungkinkan perbandingan yang mudah antara daerah, relevan untuk analisis kebijakan publik, dan memfasilitasi pemahaman tentang tren dan dinamika kemiskinan. Persentase ini juga menyediakan data yang dapat diandalkan dan mudah diakses, memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap kelompok rentan, serta memberikan cara yang sederhana dan jelas untuk mengkomunikasikan temuan penelitian. Menggunakan persentase kemiskinan membantu mengidentifikasi ketimpangan antar daerah dan mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan, menjadikannya alat yang efisien dan efektif untuk analisis sosial ekonomi.

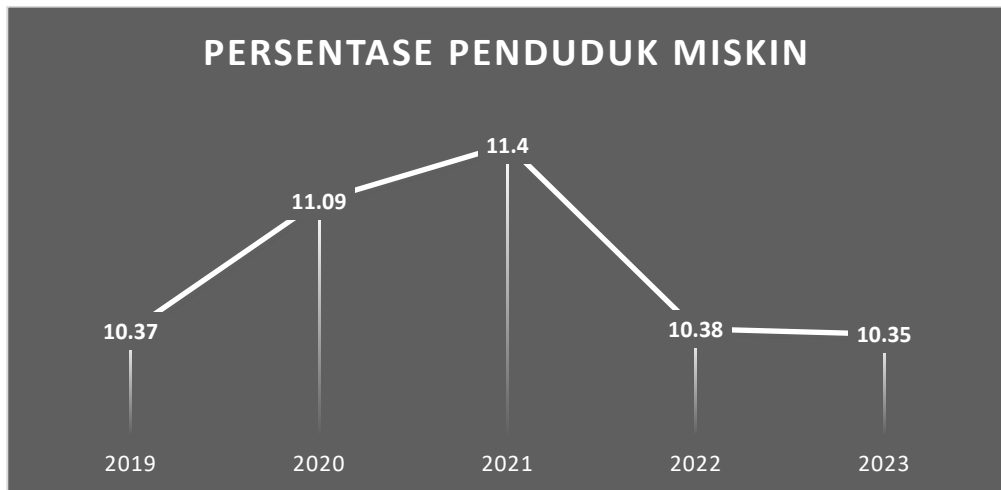
Menurut grafik 1 tersebut, DIY menempati posisi pertama selaku provinsi termiskin di pulau Jawa dengan persentase kemiskinan sebesar 11,04% pada periode Maret 2023. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa penyebab DIY selaku provinsi termiskin di Jawa adalah rupa konsumsi masyarakat DIY yang mayoritas mengantongi budaya yang kuat dalam menabung daripada dengan konsumsi sehingga pengeluaran masyarakat lebih lemah lalu akan semakin erat dengan kemiskinan serta tingginya disparitas penghasilan yang didekati dengan pengeluaran masyarakat lokal bersama masyarakat pelancong (Santia, 2023). Jawa tengah menempati posisi kedua dengan persentase kemiskinan sebesar 10,77% diikuti dengan kenaikan garis kemiskinan per kapita per bulan yang mencapai Rp. 477.580, pada periode Maret 2023 dan kenaikan garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jateng sebesar Rp. 2.044.042, pada

periode Maret 2023 (Dzulfaroh & Hardiyanto, 2023). Selanjutnya pada rentetan ketiga adalah Jawa Timur dengan persentase kemiskinan 10,35%. Tercatat jumlah populasi miskin Jawa Timur mencapai 4,14 juta orang pada Maret 2023 yang reda dari 4,23 juta orang pada September 2022 (Sutardi, 2023). Persentase kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,98% pada September 2022 menjadi 7,62% pada Maret 2023 dengan jumlah 3.888.600 penduduk miskin (Muhamad, 2023). Terakhir adalah Provinsi Banten dengan persentase kemiskinan sebesar 6,17% yang tercatat garis kemiskinan per kapita per bulan di Banten mendekati Rp. 618.721 (Sutardi, 2023).

Meskipun Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi ketiga terendah dalam hal tingkat kemiskinan di Jawa, data dari BPS menunjukkan bahwa Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam jumlah total individu yang miskin tertinggi di Indonesia, mencapai 4.236.510 jiwa, diikuti oleh Jawa Barat dengan 4.053.620 jiwa dan Jawa Tengah dengan 3.858.230 jiwa. Mereka yang memiliki pendapatan per kapita bulanan di bawah tingkat kemiskinan per September 2022 (Kamalina & Yuniati, 2023). Gubernur Jawa Timur menerangkan bahwa salah satu aspek utama yang menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan adalah kebijakan kenaikan harga BBM, yang memicu kenaikan tingkat inflasi secara keseluruhan pada bulan September 2022 sebesar 4,24% (Astuti, 2023). Selain itu, masyarakat miskin masih belum tepat dalam mengalokasikan pendapatannya, yang tercermin pada tingginya konsumsi rokok di kalangan mereka, bahkan konsumsi rokok menempati peringkat kedua setelah beras.

Tingkat kemiskinan nan tinggi selama periode September 2022-Maret 2023 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung tinggi, fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP), serta laju inflasi yang tidak stabil. Selain itu, kenaikan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2023 dianalogikan Triwulan III-2022 sejumlah 2,21% juga menjadi salah satu penyebabnya (Isnanto, 2023). Meskipun pemerintah telah melakukan intervensi melalui program bantuan sosial (bansos) untuk meluangkan beban pengeluaran penduduk miskin, namun kemiskinan selalu menjadi masalah serius. Meski terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak penduduk di provinsi ini masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk mereka keluaran. Fenomena ini merepresentasikan kompleksitas realitas sosial di tengah kemajuan ekonomi Jawa Timur. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat yang berada di lapisan atas dengan mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Meskipun berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, tantangan mengatasi persoalan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan guna mengentaskan masalah kemiskinan ini.

Grafik 2.
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2024).

Grafik 2 memperlihatkan tahun 2019 sampai tahun 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur terus mendapati eskalasi yang semakin signifikan dan mencapai puncak pada tahun 2021 menjadi 11,4 % (BPS, 2023d). Hal ini dikarenakan berlangsungnya inflasi umum sebesar 1,36 %, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan indeks tenaga kerja tanaman pangan naik 2,62% (Newsroom, 2020). Namun Provinsi Jawa Timur suah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan parah sebesar 1.480.140 jiwa atau 3,58% selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2023. Tingkat kemiskinan radikal di Jatim telah menurun drastis, dari 4,4% (atau 1.812.210 jiwa) pada tahun 2020 menjadi 0.82% (331.980 jiwa) pada bulan Maret 2023 (Putra, 2023). Berkurangnya angka kemiskinan di Jatim disebabkan beberapa faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 sebesar 1,79 %

atau di atas nasional pula tertinggi se-Jawa, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,61 %, dan peningkatan pendapatan penduduk miskin yang didukung permodalan UMKM (Antaraneews.com, 2023). Penurunan kemiskinan terus diiringi dengan peningkatan status kemandirian desa dari 697 Desa Mandiri pada tahun 2021 menjadi 1.490 Desa Mandiri pada tahun 2022, atau melonjak sebesar 113,77% (Pratama, 2023). Kemiskinan yang tengah menjadi masalah meskipun mengalami penurunan di Jawa Timur pada tahun 2021-2023 perlu diteliti kian lanjut karena penurunan tersebut mungkin belum cukup signifikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang krusial dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut antara lain distribusi pendapatan yang tidak merata, ketimpangan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta faktor-faktor sosial dan struktural lainnya yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam untuk memahami akar permasalahan kemiskinan dan merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Pengentasan kemiskinan di suatu wilayah atau negara harus mempertimbangkan beberapa elemen yang saling berhubungan dan masing-masing memiliki dampak substansial terhadap kemiskinan. Tujuannya adalah biar kebijakan sosial dan ekonomi yang diimplementasikan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan (Aini & Nugroho, 2023). Upaya dalam menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur perlu mempertimbangkan berbagai elemen yang berhubungan dan berdampak terhadap tingkat kemiskinan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diyakini cukup meredakan tingkat kemiskinan. Bila suatu daerah mendapati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini menunjukkan adanya peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Akibatnya, pendapatan masyarakat dapat meningkat beserta kesejahteraan mereka akan terbantu (Permatasari, 2019). Namun kebijakan yang terkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi rentan terhadap perubahan global yang memengaruhi produksi dan investasi (Kurniawan & A'yun, 2022). Pertumbuhan ekonomi kian meningkat di suatu daerah secara proporsional meningkatkan tingkat kemajuan daerah tersebut, demikian pula berlaku bagi tingkat kemajuan negara (Nafisah & Sukarniati, 2015). Stabilitas ekonomi terpantulkan dari kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana variabel-variabel ekonomi mengalami fluktuasi yang terkendali, terutama pada mutu komoditas dan pendapatan yang berfluktuasi dalam batas yang dapat diterima (Lubis & Maulidin, 2022). Menurut data yang dirilis oleh BPS (2023a), terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kendatipun berlangsung pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap deklinasi tingkat kemiskinan masih terbatas. Dalam penelitian Adhilla & Herianingrum (2020) mengujarkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berdampak merugikan yang substansial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian Devananto (2021) mengungkapkan bahwa tidak ada korelasi antara

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Faktor lain yang merajai kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencorakkan salah satu parameter yang difungsikan untuk menaksir tingkat kesejahteraan serta perkembangan manusia di suatu wilayah (BPS, 2023c). Kualitas sumber daya manusia, yang terpantulkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi indikator esensial pada usaha untuk mengurangi keparahan tingkat kemiskinan karena dampak langsungnya terhadap produktivitas tenaga kerja dan pendapatan (Zakiyyah *et al.*, 2023). Pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang memadai menjadi aspek pengukuran tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia di suatu wilayah (Agustin & Sumarsono, 2022). Dari hasil penelitian Alfianto dkk (2019) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyimpan dampak negatif serta substansial terhadap tingkat kemiskinan, yang mengimplikasi bahwa semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan.

BPS (2023e) menjelaskan bahwa kemiskinan juga bisa disebabkan karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebenarnya memiliki kaitan dan berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran memiliki signifikansi yang positif akan kemiskinan (Aini & Nugroho, 2023). Pengangguran berdampak fatal pada penghasilan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kejayaan mereka. Penurunan kesejahteraan konsekuensi pengangguran meningkatkan risiko terjebak dalam kemiskinan karena tidak adanya pemasukan. Terdapat

hubungan antara pengangguran dengan kemiskinan dengan arah positif, yang mengindikasikan bahwa kian tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, kemudian semakin rendah produktivitas penduduknya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi keperluan dasar mereka. Kebutuhan yang tak terpenuhi ini bisa menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan pun dapat mempengaruhi kemiskinan. Ketimpangan pendapatan mengacu pada alokasi yang tidak merata dari total pendapatan nasional di antara beragam keluarga di suatu negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan mengekspos ketidaksetaraan dalam jumlah uang yang diperoleh individu, yang mengakibatkan meruaknya kesenjangan pendapatan antar kalangan masyarakat (Aini & Nugroho, 2023). Situasi ini mengakibatkan orang berkecukupan menjadi lebih makmur, sementara mereka yang kurang mampu menjadi semakin terpinggirkan secara ekonomi. Satuan ketimpangan pendapatan yakni rasio gini. Rasio Gini difungsikan untuk memperkirakan tingkat ketidakmerataan distribusi penduduk berdasarkan kurva Lorenz. Grafik Lorenz ialah visualisasi pengeluaran total yang menganalogikan distribusi suatu variabel spesifik. Ketimpangan pendapatan dapat pula dipantau melalui survei yang dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat merancang kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (BPS, 2023b). Dalam penelitian Aini & Nugroho (2023) mengatakan bahwa semakin adilnya pembagian pendapatan suatu negara dapat membantu menekan tingkat kemiskinan. Meskipun begitu, dampaknya masih belum cukup besar untuk secara signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Dengan kata lain, ketidakseimbangan pendapatan memiliki pengaruh yang positif lamun tidak signifikan.

Meskipun telah berlangsung penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, namun masih kedapatan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, dampak pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur sangat kompleks dan saling terkait. Diperlukan upaya kooperatif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi sanggahan ini demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Penelitian sebelumnya akan kemiskinan di Jawa Timur telah melibatkan pengaruh pengeluaran pemerintah oleh Fithri & Kaluge (2017), PDRB dalam penelitian Giovanni (2018) dan Dwiashari (2020), pendapatan perkapita oleh Azizah dkk (2018), penyerapan tenaga kerja oleh Pamuji (2019), pengaruh belanja infrastruktur dalam penelitian Sumardjoko & Akhmadi (2019), upah minimum dalam penelitian Permatasari (2019) dan Adhilla & Herianingrum (2020), pendidikan dalam penelitian Devanantyo (2021) dan Aini & Nugroho (2023), serta pengaruh bantuan sosial dalam penelitian Agustin & Sumarsono (2022). Namun, belum ada pengkajian yang secara komprehensif menggabungkan variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dalam memahami kemiskinan di Jawa Timur. Sehingga diperlukan pendalaman yang lebih komprehensif untuk

memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur.

D. BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini terfokus pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga memungkinkan peneliti guna mendalami kondisi kemiskinan yang spesifik di wilayah tersebut dan memberikan rekomendasi yang relevan.
2. Indikator utama yang dipakai dalam pengkajian ini ialah persentase kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur berdasarkan parameter lembaga terkait Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Penelitian ini membatasi variabel ekonomi yang diteliti pada pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan, tanpa memasukkan variabel ekonomi lain yang mungkin berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
4. Penelitian ini membatasi periode waktu tertentu, yakni 2017-2022, untuk memperoleh representasi yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan selama periode tersebut.
5. Observasi ini mengaplikasikan data sekunder yang mungkin memiliki keterbatasan dan ketidakpastian terkait dengan kualitas dan ketersediaan data.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi Terhadap Teori Kemiskinan

Memberikan pemahaman intensif tentang aspek-aspek yang secara teoritis memengaruhi kemiskinan di tingkat kabupaten/kota sehingga dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai kemiskinan dan membantu dalam pengembangan model konseptual yang lebih komprehensif.

b. Pengembangan Kerangka Konseptual

Penelitian ini mampu membantu dalam pengembangan kerangka konseptual yang dalam digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang ini dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

c. Peningkatan Keterlibatan Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menyerukan keterlibatan lebih lanjut dari akademisi dan peneliti dalam mengkaji isu kemiskinan di tingkat lokal. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman kolektif terhadap masalah tersebut.

d. Relevansi Kebijakan Publik

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan cakrawala yang berfaedah bagi pembuat kebijakan dalam mengatur program-program intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

e. Pembukaan Peluang Penelitian Lanjutan

Penelitian ini sanggup mengembangkan peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan multidisiplin dalam menganalisis dampak

faktor-faktor tertentu terhadap kemiskinan serta menjembatani kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Hasil penelitian mampu memberikan bahan yang diperlukan bagi pemerintah dalam merancang strategi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk program-program penanggulangan kemiskinan melalui pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.
- 3) Temuan dari penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi program-program yang sudah ada, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi pemerintah dapat meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.
- 2) Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kapasitas penelitian di perguruan tinggi, terutama dalam konteks penelitian interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.

- 3) Temuan dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam perkuliahan dan program-program penyuluhan kepada masyarakat mengenai isu kemiskinan.
- c. Bagi Masyarakat
- 1) Dengan implementasi kebijakan yang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
 - 2) Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akar permasalahan dan memberi landasan bagi upaya pemberdayaan diri untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
 - 3) Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka dengan persepsi yang lebih baik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.